

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SKRIPSI

ANALISIS PERAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DALAM PENDATAAN PENDUDUK DI KOTA PEKANBARU

Oleh :

EKIN SEPRIAN
11375100919



UIN SUSKA RIAU

PROGRAM S.1

JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA FAKULTAS EKONOMI
DAN ILMU SOSIAL UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN
SYARIF KASIM RIAU PEKANBARU 2020



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : EKin SEPRIAN
 NIM : 11375100919
 FAKULTAS: EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 JURUSAN : ADMINISTRASI NEGARA
 JUDUL : ANALISIS PERAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DALAM PENDATAAN PENDUDUK DI KOTA PEKANBARU

Disetujui Oleh

Dosen Pembimbing

Ratna Dewi, S.Sos, M.Si

NIP. 198110302007102004

Mengetahui :

Dekan

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial

Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, MM

NIP. 19620521989031003

Ketua Jurusan

Administrasi Negara

DR. Kamaruddin, S.Sos, M.Si

NIP. 197901012007101003





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta dilindungi Undang-Undang
UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : EKin SEPRIAN
NIM : 11375100919
FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
JURUSAN : ADMINISTRASI NEGARA
JUDUL : ANALISIS PERAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDATANGAN SIPIL DALAM PENDATAAN PENDUDUK DI KOTA PEKANBARU
HARI/ TANGGAL UJIAN : SELASA 21 JULI 2020

DISETUJUI OLEH

Ketua Penguji

Sahwitri Triandani, SE, M.Si

NIP. 19820806 200604 2 2002

MENGATAHUI :

Penguji I

Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos, M.Si

NIP. 19781025 200604 1 002

Penguji II

Roni Jaya, S.Sos, M.Si

NIK. 130 717 060

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

ANALISIS PERAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DALAM PENDATAAN PENDUDUK DI KOTA PEKANBARU

OLEH : EKIN SEPRIAN

Penelitian ini difokuskan untuk mengungkap kualitas pendataan administrasi kependudukan di kota Pekanbaru. Hal ini didasarkan masih ditemukan berbagai kendala dalam pendataan administrasi kependudukan seperti, keterlambatan output pendataan (tidak sesuai prosedur pelayanan dan keterbatasan sarana dan prasarana pelayan. Pelayanan administrasi kependudukan merupakan rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dokumen dan data kependudukan. Dengan pelayanan publik yang berkualitas akan meningkatkan kepuasan warga dan mewujudkan validitas administrasi kependudukan. Tujuan dari penelitian sendiri adalah mengetahui bagaimana peran dinas kependudukan dan pencatatan sipil dalam pendataan penduduk dan juga menyangkut hambatan dan kendala yang terjadi selama kegiatan berlangsung di kota Pekanbaru. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu dalam observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan administrasi kependudukan di kecamatan belum optimal, dimana dimensi reliability & responsibility dan tangibel aspek paling dominan menjadi permasalahan warga. Penelitian juga menunjukkan bahwa pelayanan administrasi kependudukan perlu di dukung perangkat teknologi baik software ataupun hardware yang tepat sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan.

Kata kunci : Peran , Pendataan Disdukpcapil Kota Pekanbaru

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Segala puji sukur bagi Allah SWT, sang Khalik dari makhluknya, Maha Raja dari segala raja, Rabbnya semua alam semesta, Sang Cahaya atas segala Cahaya, yang kasih sayangnya melebihi apapun didunia ini. Hanya Dialah yang wujud, yang baqo, dan atas perkenan-Nya pula Sezarroh kuasa-Nya ini dinisbikan dari ketiadaan, sebagai ujian, pembelajaran, dan menjadi suatu ruas jalan penghambaan bagi diri ini, seseorang yang baru memulai mencoba mengenali hakikat makluk pada dirinya, demi untuk mengenal Khalik-Nya.

Salam kemuliaan bagi kekasih-Nya, yang hanya baginya seorang semua diwujudkan dari ketiadaan, sang cermin dari maharaja cahaya, sang senyum dari yang maha penyayang. Kekasih dari semua pecinta, rosullullah Muhammad SAW, pembimbing bagi siapa yang mencarinya dan para sahabat-sahabatnya dan semoga kita tergolong pada orang-orang ahli surga. Amin.

Pembuatan skripsi ini bertujuan untuk melengkapi syarat memperoleh gelar Sarjana Sosial (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Yang penulis beri judul ***“ANALISIS PERAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDATATAN SIPIL DALAM PENDATAAN PENDUDUK DI KOTA PEKANBARU ”***

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Skripsi yang ideal ini, kata orang sedikit banyak seharusnya bisa menunjukkan siapa kita, dan apa saja yang telah kita peroleh selama sekian tahun kuliah.

Pada penyusunan skripsi ini, penulis banyak sekali mendapat bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Semoga Allah memberikan ganjaran yang setimpal. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dan memotivasi baik moril maupun materil, terutama penulis sampaikan kepada :

1. Bapak. **Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, S.Ag., M.Ag.**, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Bapak. **Dr. Drs. H. Muh. Said HM., M.Ag., MM** sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU.
3. Bapak **Dr. Kamaruddin, S.Sos, M.Si** sebagai Ketua Jurusan Administrasi Negara yang selalu memberikan motivasi dan meluangkan waktu demi kesuksesan mahasiswa.
4. Bapak **Dr. Jhon Afrizal, S.HI, MA** sebagai Sekretaris Jurusan Administrasi Negara dan juga kepada ibuk **Ratna Dewi S.Sos, M.Si** sebagai Dosen Pembimbing saya yang selalu memberikan motivasi dan dan arahan meluangkan waktu demi kesuksesan mahasiswa.
5. Bapak dan Ibu Dosen pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau yang telah banyak memberi ilmu pengetahuan kepada penulis serta seluruh staf pegawai Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dan Pada akhirnya terselaikan juga, walaupun melalui sebuah perenungan yang lama, tentunya ditambah dengan ketidak disiplin dan ketidak sesuaian dengan target dan jadwal (ini kalimat penyesalan, bukan permohonan maklum), rasanya ini bukanlah karya terbaik saya. Masih sangat banyak kekurangan dari karya ini, dan saya sendiri menganggap hasil akhir dari karya ini sebagai karya seorang manusia yang baru belajar membiasakan diri menggunakan media baru. Tentunya, hasilnya baru sebuah karya seseorang yang belajar menuangkan ide, yang masih jauh dari tingkat kesempurnaan.

Terakhir semoga kita semua senantiasa dipelihara dalam jalan lurus keridhaan-Nya, dan kelak dipersatukan dengan jalinan mawar wangi dalam istana terang kemilau, bersama para kekasih-Nya dimuka singgasana Sang Maharaja Cahaya. Demikianlah, semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih. Wasallam Mu'alaikum...

Pekanbaru, Januari 2020

EKIN SEPRIAN

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Perumusan masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian	11
1.4 Manfaat Penelitian.....	11
1.5 Sistematika Penulisan	11
BAB II : Telaah Pustaka	13
2.1 Kerangka Teori	13
2.1.1 Pengertian Administrasi	13
2.1.2 Teori Administrasi Publik	14
2.1.3 Pengertian Administrasi Kependudukan	15
2.1.4 Teori Peran	17
2.1.5 Peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	19
2.1.6 Pengertian Kependudukan.....	24
2.1.7 Pengendalian Kependudukan	26
2.1.8 Kebijakan Pengelolaan Laju Pertumbuhan Penduduk	29
2.2 Definisi Konsep	34
2.3 Kerangka Berfikir	35
2.4 Konsep Operasional Variabel	36
2.5 Pandangan Islam Tentang Pertumbuhan Penduduk	38
BAB III : Metode Penelitian.....	41
3.1 Jenis Penelitian	41
3.2 Lokasi Dan Waktu Penelitian	41

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.3 Infomen Penelitian dan Sumber Data.....	41
3.4 Teknik Pengumpulan Data	43
3.4.1 Reduksi Data.....	44
3.4.2 Penyajian Data.....	44
3.4.3 Menarik Kesimpulan atau Verivikasi.....	45
3.5 Jenis Data.....	45
3.6 Analis Data	46
BAB VI : Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	47
4.1 Letak dan Luas Daerah	47
4.2 Sejarah Ringkas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	50
4.3 Struktur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.....	51
BAB V Hasil Penelitian Dan Pembahasan.....	62
5.1 Peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dalam Pengendalian dan Pengawasan	62
5.2 Faktor Hambatan dan Kendala Dalam Pelaksanaan Peran Dianas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dalam Pengendalian dan Pengawasan Penduduk Di Kota Pekanbaru.....	90
BAB VI Kesimpulan Dan Saran	94
6.1 Kesimpulan.....	94
6.2 Saran	97
DAFTAR PUSTAKA	98
DAFTAR LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 : Jumlah Penduduk Kota Pekanbaru Menurut Kecamatan Tahun 2012- 2015

Tabel 1.2 : Jumlah Penduduk Kota Pekanbaru Yang Memiliki KTP dan Akte Kelahiran Tahun 2015

Tabel 2.1 : Konsep Operasional Variabel

Tabel 3.1 : Jumlah Populasi Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru

Tabel 3.2 : Populasi dan Sampel Penelitian

Tabel 4.1 : Jarak Dari Kota Pekanbaru dan Kabupaten yang ada di Kota Pekanbaru

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 : Kerangka Berfikir

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Sejalan dengan perkembangan situasi dan kondisi yang mengalami perubahan paradigma, Pemerintah Daerah diberikan otonomi daerah yang seluas luasnya untuk mengatur rumah tangganya sendiri yang ditandai dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan telah diperbaharui dengan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Hal ini juga berimplikasi terhadap urusan-urusan kependudukan, maka terbitlah UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Berkaitan dengan hal tersebut, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menerangkan bahwa instansi pelaksana adalah perangkat kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan. Sementara itu, pelaksanaan otonomi daerah dapat menimbulkan berbagai tantangan yang pada hakekatnya adalah bagaimana Pemerintah Kota Pekanbaru khususnya Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil dapat menjalankan kewenangan-kewenangan yang dimilikinya, sehingga mampu mendorong semakin meningkatnya kualitas dan kuantitas penyelenggaraan kependudukan seperti pelayanan administrasi kependudukan, pengendalian penduduk komuter, dan pengendalian pertumbuhan penduduk.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rangkaian peristiwa kependudukan yang meliputi pindah datang penduduk, kepemilikan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk serta peristiwa penting yang meliputi lahir, mati, kawin, cerai, pengesahan/pengakuan/pengangkatan anak dan peristiwa penting lainnya yang menyangkut kependudukan harus terintegrasi dalam database kependudukan nasional serta keabsahan dan kebenaran atas dokumen kependudukan yang ditertibkan dalam rangka terwujudnya tertib administrasi kependudukan baik tingkat daerah sampai nasional, sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang administrasi kependudukan.

Administrasi Kependudukan sebagai suatu sistem diharapkan dapat diselenggarakan sebagai bagian dari Penyelenggaraan Administrasi Negara. Dari sisi kepentingan penduduk, administrasi kependudukan memberikan pemenuhan hak-hak administratif, seperti pelayanan publik serta perlindungan yang berkenaan dengan dokumen kependudukan tanpa adanya perlakuan yang diskriminatif. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru mempunyai fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kependudukan dan catatan sipil. Dalam hal penyelenggaraan urusan pemerintahan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru memiliki data penduduk sebagai dasar dari perencanaan pembangunan daerah dan pelayanan publik dalam bidang kependudukan, sehingga dinas mempunyai peranan yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan umum. Sedangkan dalam hal pembangunan khususnya di tingkat



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

daerah, diperlukan adanya komitmen untuk memperhitungkan faktor penduduk, oleh karena itu diperlukan adanya kesepakatan dalam melaksanakan tertib administrasi kependudukan serta kerjasama antar berbagai instansi guna mencapai persamaan persepsi dan tujuan. Hal ini merupakan upaya dalam pengendalian laju pertumbuhan penduduk terutama di Kota Pekanbaru.

Sebagai langkah pengendalian laju pertumbuhan penduduk, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru melaksanakan kegiatan pendataan penduduk pendatang bagi penduduk yang tinggal di wilayah Kota Pekanbaru tetapi tidak memiliki identitas penduduk (KTP_el) sesuai dengan domisilinya, karena perpindahan penduduk tersebut tidak dibarengi dengan proses pengurusan administrasi kependudukan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Kota Pekanbaru adalah ibu kota dan kota terbesar di provinsi Riau, Indonesia. Kota ini merupakan kota perdagangan dan jasa, termasuk sebagai kota dengan tingkat pertumbuhan, migrasi dan urbanisasi yang tinggi. Pekanbaru mempunyai satu bandar udara internasional yaitu Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II. Dan juga mempunyai terminal bus terminal antar kota dan antar provinsi Bandar Raya Payung Sekaki, serta dua pelabuhan di Sungai Siak, yaitu Pelita Pantai dan Sungai Duku. Saat ini Kota Pekanbaru sedang berkembang pesat menjadi kota dagang yang multi-etnik, keberagaman ini telah menjadi kepentingan bersama untuk dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakatnya.

Mengatasi permasalahan kependudukan di Indonesia, pemerintah terus berupaya membuat kebijakan berupa Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBP). Dimana program ini memprioritaskan kualitas daripada kuantitas, dan mengurangi angka kematian



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ibu dan anak. Program Keluarga Berencana untuk mengurangi angka kematian ibu dan anak dengan mengatur jarak dan membatasi kelahiran.

Pemerintah membuat pelaksanaan Program KB (Keluarga Berencana) tertuang dalam Perundang –Undangan Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dalam menjelaskan bahwa dalam mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan keluarga berkualitas dilakukan upaya pengendalian angka kelahiran dan penurunan angka kematian, pengarahan mobilitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk pada keseluruhan dimensinya, peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, penyiapan dan pengaturan perkawinan serta kehamilan sehingga penduduk menjadi sumber daya manusia yang tangguh bagi pembangunan dan ketahanan nasional, serta mampu bersaing dengan bangsa lain, dan dapat menikmati hasil pembangunan secara adil dan merata.

Pelaksanaan Program KB (Keluarga Berencana) juga tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga. Perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga adalah upaya terencana untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan mengembangkan kualitas penduduk pada seluruh dimensi penduduk. Pembangunan keluarga adalah upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat.

Berikut ini dapat dilihat jumlah penduduk Kota Pekanbaru dalam kurun tahun 2012-2015 :

Tabel 1.1 : Jumlah Penduduk Kota Pekanbaru Menurut Kecamatan Tahun 2012-2015

No.	Kecamatan	2012		2013		2014		2015	
		Jumlah Penduduk	%	Jumlah Penduduk	%	Jumlah Penduduk	%	Jumlah Penduduk	%
1.	Sukajadi	53.331	5,85	55.624	5,70	58.031	5,54	58.618	5,41
2.	Pekanbaru Kota	32.416	3,56	33.583	3,44	34.837	3,33	34.753	3,21
3.	Sail	24.756	2,72	26.117	2,68	27.518	2,63	27.948	2,58
4.	Lima Puluh	47.897	5,25	49.897	5,12	52.197	4,99	52.721	4,86
5.	Senapelan	41.534	4,56	43.856	4,50	45.734	4,37	45.994	4,24
6.	Rumbai	58.832	6,45	63.620	6,52	69.501	6,64	73.461	6,78
7.	Bukit Raya	92.171	10,11	97.247	9,97	103.618	9,90	106.282	9,80
8.	Tampan	150.617	16,52	164.308	16,85	181.329	17,32	193.439	17,84
9.	Marpoyan Damai	131.419	14,42	139.816	14,34	149.681	14,30	154.794	14,28
10.	Tenayan Raya	120.384	13,21	132.511	13,59	145.623	13,91	152.255	14,04
11.	Payung Sekaki	90.147	9,89	95.949	9,84	102.560	9,80	106.145	9,79
12.	Rumbai Pesisir	68.031	7,46	72.776	7,46	76.287	7,29	77.851	7,18
TOTAL		911.535	100	975.304	100	1.046.916	100	1.084.261	100

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, 2016

Dari tabel diatas dapat dilihat dari 12 kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru dalam kurun tahun 2012-2015, jumlah penduduk terbanyak adalah di Kecamatan Tampan (17,84% dari total penduduk Kota Pekanbaru tahun 2015) dan paling sedikit jumlah penduduk di Kecamatan Sail (2,58 % dari total penduduk Kota Pekanbaru tahun 2015). Sementara data kependuduk tahun 2015

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat dilihat penduduk yang memiliki KTP atau akte kelahiran yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1. 2 : Jumlah Penduduk Kota Pekanbaru Yang MemilikiKTP dan Akte Kelahiran Tahun 2015

No.	Kecamatan	Kepemilikan KTP		Yang Memiliki Akte Kelahiran	Jumlah Penduduk
		Memiliki KTP_el	Wajib KTP		
1.	Sukajadi	28.515	41.790	28.646	58.618
2.	Pekanbaru Kota	15.861	25.508	11.268	34.753
3.	Sail	14.250	20.070	11.394	27.948
4.	Lima Puluh	25.732	38.370	17.111	52.721
5.	Senapelan	24.359	33.290	16.698	45.994
6.	Rumbai	33.449	50.071	25.346	73.461
7.	Bukit Raya	52.827	75.409	33.880	106.282
8.	Tampan	82.488	129.664	60.073	193.439
9.	Marpoyan Damai	61.146	108.510	47.391	154.794
10.	Tenayan Raya	64.309	105.604	46.417	152.255
11.	Payung Sekaki	51.439	74.759	36.288	106.145
12.	Rumbai Pesisir	40.513	55.200	26.336	77.851
TOTAL		494.888	758.245	360.848	1.084.261

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, 2016

Dari tabel diatas dapat dilihat dari 12 kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru dalam tahun 2015, jumlah penduduk terbanyak yang memiliki KTP_el adalah di Kecamatan Tampan sebanyak 82.488 orang, yang memiliki wajib KTP dan Akte Kelahiran terbanyak juga di Kecamatan Tampan.

Berdasarkan berita dari Tribun Pekanbaru pada tanggal 23 September 2016 dengan judul *“Angka Pertumbuhan Penduduk di Pekanbaru Banyak Disumbangkan Pendatang.”*

Penataan administrasi pemerintahan harus maksimal. Apalagi pertumbuhan bukan karena angka kelahiran, tapi laju karena banyaknya para pendatang. Pertumbuhan penduduk di Kota Pekanbaru setiap tahunnya meningkat. Bahkan data terakhir yang disampaikan Walikota Pekanbaru Firdaus MT, jumlah penduduk di akhir tahun 2015 mencapai 1,038,118 jiwa. Bahkan siang hari mencapai 1,5 juta jiwa. Hanya saja, lajunya pertumbuhan penduduk ini, tidak diikuti dengan penataan yang mapan. Anggota DPRD Kota Pekanbaru Ida Yulita Susanti menjelaskan, dengan kondisi tersebut, penataan administrasi pemerintahan harus maksimal. Apalagi pertumbuhan tersebut bukan karena angka kelahiran, tapi laju karena banyaknya para pendatang. Hal ini terjadi karena Kota Pekanbaru merupakan kota jasa dan perdagangan.

Terkait hal ini, Pemko harus mengantisipasi soal administrasi kependudukan. "Jangan banyaknya pendatang, tetapi tidak jelas administrasi kependudukannya (KTP). Ini tentunya bisa mengganggu pertumbuhan ekonomi kita," kata Ida, Jumat (23/9/2016) kepada Tribunpekanbaru.com.

Maka dari itu, dewan menghimbau perangkat Kelurahan, mulai RT dan RW untuk mendatanya secara serius. Terutama kepada pendatang. Baik surat pindahanya, maupun administrasi yang lain.

"Kalau memang tidak jelas, diminta pulang kampung saja. Karena dampaknya nanti macam-macam. Bisa saja meningkatkan kriminalitas, angka pengangguran dan lainnya," sebutnya.

Sebelumnya, dalam laporan pertanggungjawaban akhir masa jabatan kepala daerah Kota Pekanbaru tahun 2012-2017, yang disampaikan Walikota Pekanbaru Firdaus MT, dalam rapat Paripurna penyampaian LKPj kemarin, laju pertumbuhan penduduk kota Pekanbaru cukup signifikan. Bahkan Kota Pekanbaru sudah bisa menyandang status sebagai Kota Metropolitan. (Sumber : Tribun Pekanbaru tanggal 23 September 2016).

Dari berita Tribun Pekanbaru pada tanggal 23 September 2016 dapat diketahui laju pertumbuhan harus ditata secara administrative dengan maksimal agar terdata dengan jelas dan tidak mengganggu kinerja pemerintah daerah juga diketahui laju pertumbuhan penduduk kota Pekanbaru cukup signifikan.

Didalam peraturan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang termuat dalam bab 2 pasal 3 dan 4, setiap penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Dalam menyelenggarakan Administrasi Kependudukan di Kota Pekanbaru dari hasil observasi yang penulis lakukan, penyelenggaraan pelayanan yang diberikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru ditemui permasalahan khususnya pelayanan Administrasi kependudukan, yaitu :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- 1) Dasar hukum Pencatatan Kependudukan diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta peraturan pelaksanaannya, yaitu Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 serta Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- 2) Penduduk diwajibkan untuk mendaftarkan diri dan melaporkan peristiwa yang dialami baik mereka maupun beserta keluarganya melalui Pendaftaran Penduduk yang meliputi kegiatan pencatatan dan pelaporan data kependudukan yang terdiri dari kelahiran, perkawinan, perpindahan, dan kematian penduduk serta statistik kependudukan lainnya yang dilakukan mulai dari tingkat desa/kelurahan hingga tingkat provinsi.
- 3) Dilihat dari Waktu Produk Pelayanan ditemui permasalahan yakni perangkat keras (hardware) yang dipakai untuk mendukung operasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan belum memenuhi persyaratan teknis pengoperasian, misalnya hard disk terlalu kecil, akibat data image (photo, tandatangan dan sidik jari pemohon) disimpan secara terpisah di optical Disk, selain itu hasil scanning photo tidak sesuai dengan aslinya.
- 4) Dilihat dari Kompetensi Petugas pemberi pelayanan ditemui permasalahan yakni pelayanan yang diberikan oleh pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terkesan kurang ramah.
- 5) Kurangnya sosialisasi iklan layanan masyarakat yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui media cetak dan elektronik, komunikasi, informasi dan edukasi kepada seluruh lapisan



masyarakat sehingga kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan masih kurang.

- 6) Masih ada masyarakat yang belum mengetahui rangkaian prosedur pembuatan akta kelahiran atau pengurusan administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Dari permasalahan di atas, maka penulis berkeinginan melakukan penelitian dengan judul : **"Analisis Peran Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Dalam Pendataan Penduduk di Kota Pekanbaru."**

1.1. Perumusan Masalah

Dari fenomena peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam pendataan penduduk di Kota Pekanbaru ternyata masih dijumpai beberapa permasalahan salah satunya kurang pemahaman dan pengetahuan masyarakat artinya peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam pendataan penduduk di Kota Pekanbaru belum maksimal. Berdasarkan permasalahan ini, rumusan masalah penelitian yang diajukan adalah sebagai berikut

- 1) Bagaimana peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam pendataan penduduk di Kota Pekanbaru ?
- 2) Apa saja hambatan dan kendala dalam pelaksanaan peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam pendataan penduduk di Kota Pekanbaru ?

1.3. Manfaat Penelitian

- 1) Dapat memberikan sumbangan pemikiran sebagai bahan pertimbangan bagi instansi dalam hal peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam pendataan penduduk di Kota Pekanbaru.
- 2) Untuk menambah wawasan penulis dalam masalah mengenai peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam pendataan penduduk di Kota Pekanbaru.
- 3) Sebagai bahan informasi bagi para peneliti selanjutnya.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Di dalam bab ini, peneliti membahas tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Di dalam bab ini, penulis membahas tentang konsep-konsep teoritis yang relevan dengan judul penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

1.2. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah:

- 1) Untuk mengetahui peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam pendataan penduduk di Kota Pekanbaru.
- 2) Untuk mengetahui hambatan dan kendala dalam pelaksanaan peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam pendataan penduduk di Kota Pekanbaru.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di dalam bab ini, peneliti membahas tentang lokasi penelitian dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, populasi dan sampel, serta metode analisis data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Di dalam bab ini, penulis membahas tentang peraturan daerah tentang terbentuknya Kota Pekanbaru dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Di dalam bab ini, penulis membahas permasalahan yang diteliti kemudian dianalisis.

BAB VI : PENUTUP

Peneliti memberikan Saran dan Tanggapan akan keseluruhan selama penelitian Skripsi ini berlangsung.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1. Kerangka Teori

2.1.1. Pengertian Administrasi

Banyak pengertian administrasi yang dikemukakan oleh para ahli administrasi, ada pengertian administrasi secara luas dan ada pengertian administrasi secara sempit, dan bahkan ada yang mengartikan sebagai proses sosial. Dalam pengertian yang luas menurut Musanef (2009:1) dalam bukunya Manajemen Kepegawaian di Indonesia menyebutkan bahwa: Administrasi adalah kegiatan sekelompok manusia melalui tahapan-tahapan yang teratur dan dipimpin secara efektif dan efisien, dengan menggunakan sarana yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam implementasinya, administrasi berkembang dan mempunyai tugas-tugas yang biasa disebut sebagai fungsi administrasi diantaranya adalah fungsi perencanaan, pengorganisasian sampai dengan fungsi pengawasan.

Sedangkan dalam pengertian sempit, yang dikemukakan oleh Soewarno Handyaningrat (2012:2), dalam bukunya “Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen” menyebutkan bahwa: Administrasi adalah suatu kegiatan yang meliputi catat-mencatat, surat menyurat, pembukuan ringan, ketik mengetik, agenda dan sebagainya yang bersifat teknis ketatausahaan.

Menurut Prajudi (2009:45) dalam bukunya yang berjudul Administrasi dan Manajemen Umum mengemukakan sebagai berikut: Administrasi adalah suatu sistem atau sistema yang tertentu, yang memerlukan input, transportasi,

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengolahan dan output tertentu. Sedangkan menurut Sondang P. Siagian (2012:36) dalam bukunya yang berjudul Filsafat Administrasi, mengemukakan pengertian administrasi sebagai berikut: Administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan dari keputusan-keputusan yang telah diambil dan pelaksanaan itu pada umumnya dilakukan oleh dua orang manusia atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya .

Berdasarkan beberapa pengertian administrasi dari para ahli di atas dapat disimpulkan sebagai berikut: Administrasi adalah keseluruhan proses rangkaian pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang terlibat dalam suatu bentuk usaha bersama demi tercapainya tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Meskipun rumusannya sederhana, pengertiannya tetap mempunyai cakupan yang luas, yaitu seluruh proses kegiatan yang berencana dan melibatkan seluruh anggota kelompok. Dalam administrasi juga dibutuhkan input, transportasi, pengolahan dan output tertentu.

2.1.2. Teori Administrasi Publik

Teori Administrasi Publik Menurut pendapat Ridwan (2009:16) mendefinisikan bahwa Administrasi adalah : sebagai keseluruhan proses kerja sama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalisasi tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan didalam suatu organisasi.

Pendefinisian mengenai teori telah disampaikan oleh beberapa ahli. Salah satunya menurut Kerlinger dalam Rudiansyah (2011:2), menyatakan bahwa teori adalah serangkaian konstruk atau konsep yang menyajikan suatu pandangan

sistematis tentang fenomena dengan focus yang merinci hubungan antar variable, dengan tujuan menjelaskan dan memprediksi gejala tersebut. Implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas. Implementasi adalah suatu rangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan. Rangkaian kegiatan tersebut mencakup persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut.

2.1.3. Pengertian Administrasi Kependudukan

Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sector lain (Depdagri RI Dirjen Administrasi Kependudukan, 2008: 3).

Pengertian tersebut di atas berarti bahwa setiap penduduk harus di data dan ditata melalui penertiban dokumen yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil setempat agar pemerintah dapat dengan mudah memenuhi segala urusan kependudukan bila dokumen setiap penduduk dapat dikelola dengan baik dan tertib.

Setiap penduduk mempunyai hak dan kewajibannya, kewajiban setiap penduduk adalah mematuhi semua peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan.

Dengan memenuhi administrasi kependudukan yang dokumennya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang ada di seluruh daerah yang ada di Indonesia, sedangkan hak setiap penduduk adalah untuk dilindungi dan diperlakukan secara adil dalam memenuhi semua urusan kependudukan yang telah ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan hukum yang berlaku. Hak dan kewajiban tersebut berlaku bagi semua penduduk Indonesia yaitu warga Negara Indonesia dan warga Negara Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.

Penataan administrasi direkomendasikan untuk penyelenggaraan registrasi penduduk termasuk pemberian Nomor Induk Kependudukan (NIK). Dalam pelaksanaan sistem ini, semua penduduk baik Warga Negara Indonesia (WNI) maupun warga Negara Asing (WNA) yang mengalami kejadian vital atau perubahan status kependudukannya harus mendaftarkan diri atau mencatatkan perubahan status tersebut kepada para petugas yang ditunjuk oleh negara. Dengan adanya sistem ini, pemerintah akan memperoleh kemudahan dalam mengatur bentuk-bentuk pelayanan publik lainnya misalnya dibidang pendidikan, kesehatan dan sebagainya.

Dalam peraturan pemerintah pada Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dimaksud dengan Administrasi kependudukan adalah: "Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan

penataan dan penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui program pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. (UU No. 23 Tahun 2006: 4).

2.1.4. Teori Peran

Kamus Besar Bahasa Indonesia (2010:17), peran didefinisikan sebagai suatu yang menjadi bagian atau yang memegang pimpinan terutama dalam terjadinya suatu hal atau peristiwa. Sementara itu Soekanto (2008:55) mendefinisikan peranan yakni pertama, perilaku seseorang atas kedudukan tertentu dan hubungannya dengan masyarakat. Kedua, peranan adalah suatu kelompok penghargaan manusia terhadap cara bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu berdasarkan status dan fungsi sosial. Ketiga, peranan adalah pola tingkah laku yang didasarkan atas kedudukan tertentu dalam kolektivitas dari keadaan sosial tertentu. Sedangkan Miftah Thoha (2008:62) sendiri memberi batasan bahwa peran adalah suatu rangkaian perilaku yang terwujud yang ditimbulkan karena jabatan tertentu.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa peranan adalah yang memegang pimpinan terutama dalam terjadinya suatu hal dan aspek dinamis dari pada kedudukan sesuai dengan hak dan kewajibannya yang ditimbulkan karena jabatan tertentu dalam suatu organisasi. Analisis terhadap perilaku peranan dapat dilakukan melalui tiga pendekatan : (1) ketentuan peranan, (2) gambaran peranan, dan (3) harapan peranan. Ketentuan peranan adalah pernyataan formal dan terbuka tentang perilaku yang harus ditampilkan oleh seseorang dalam membawa

perannya. Gambaran peranan adalah suatu gambaran tentang perilaku yang secara aktual ditampilkan seseorang dalam membawakan perannya, sedangkan harapan peranan adalah harapan orang-orang terhadap perilaku yang ditampilkan seseorang dalam membawakan perannya.

Menurut Abu Ahmadi (2009:15) peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsi sosialnya.

Menurut Harahap (2007:854), peran berarti laku, bertindak. Didalam kamus besar bahasa Indonesia peran ialah perangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat.

Peran dalam ilmu sosial berarti suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki jabatan tertentu, seseorang dapat memainkan fungsinya karena posisi yang didudukinya tersebut.

Menurut Miftah Thoha (2008:65), peran merupakan tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang menempati suatu posisi di dalam status sosial, syarat-syarat peran mencakup 3 (tiga) hal, yaitu :

1. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
2. Peran adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Peran juga dapat

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dikatakan sebagai perilaku individu, yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

3. Peran adalah suatu rangkaian yang teratur yang ditimbulkan karena suatu jabatan. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kecenderungan untuk hidup berkelompok. Dalam kehidupan berkelompok tadi akan terjadi interaksi antara anggota masyarakat yang satu dengan anggota masyarakat yang lainnya. Tumbuhnya interaksi diantara mereka ada saling ketergantungan. Dalam kehidupan bermasyarakat itu munculah apa yang dinamakan peran (role). Peran merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan seseorang, apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka orang yang bersangkutan menjalankan suatu peranan. Untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas ada baiknya terlebih dahulu kita pahami tentang pengertian peran.

Dari beberapa pengertian diatas, penulis menyimpulkan bahwa peran adalah suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki status atau kedudukan tertentu.

2.1.5. Peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sesuai pengertian peran yang dinyatakan oleh Miftah Thoha (2008:62) sendiri memberi batasan bahwa peran adalah suatu rangkaian perilaku yang terwujud yang ditimbulkan karena jabatan tertentu.

Peran dalam ilmu sosial berarti suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki jabatan tertentu, seseorang dapat memainkan fungsinya karena posisi yang didudukinya tersebut. Untuk melihat peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat dilihat dari tugas dan fungsinya sesuai Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan Dan Tugas Pokok Dinas-Dinas Dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru Pasal 19 yang menyatakan bahwa :

1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
2. Dinas Kependudukan dan Pecatatan Sipil dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
3. Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Sekretariat Dinas dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
5. Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
6. Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas.
7. Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Jumlah dan jenis jabatan fungsional akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

Selanjutnya dalam Pasal 20 dijelaskan :

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian Urusan Pemerintah Daerah Kota di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Untuk melaksanakan perannya dalam menanggulangi laju pertumbuhan penduduk maka susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari:

1. Bidang Perencanaan dan Perkembangan Kependudukan, membawahi :
 - a. Seksi Perencanaan Kependudukan
 - b. Seksi Perkembangan dan Persebaran
 - c. Seksi Pemantauan dan Evaluasi.
2. Bidang Pendaftaran Penduduk, membawahi :
 - a. Seksi Identitas Penduduk
 - b. Seksi Mutasi Penduduk
 - c. Seksi Pengendalian dan Pengawasan Penduduk.
3. Bidang Pencatatan Sipil, membawahi :
 - a. Seksi Kelahiran dan Kematian
 - b. Seksi Perkawinan dan Perceraian
 - c. Seksi Pencatatan Sipil Lainnya.
4. Bidang Data dan Infomasi Kependudukan, membawahi :
 - a. Seksi Pendataan dan Pelaporan
 - b. Seksi Jaringan Komunikasi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Seksi Informasi dan Penyuluhan.

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru, tugas pokok Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut: “Melaksanakan sebahagian urusan Pemerintah Kota di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil”.

Dengan rincian tugas antara lain:

- a. Merumuskan kebijakan teknis dalam bidang Pendaftaran Pendudukan, Pencatatan Sipil dan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.
- b. Menyelenggarakan urusan Pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Pendaftaran Pendudukan, Pencatatan Sipil dan Informasi Administrasi Kependudukan.
- c. Membina dan melaksanakan tugas pendaftaran pendudukan dan pencatatan sipil.
- d. Menyelenggarakan urusan penatausahaan dinas.
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pemimpin sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari:

- a. Kepala Dinas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- b. Sekretariat
- c. Bidang Perencanaan dan Perkembangan Kependudukan
- d. Bidang Pendaftaran Penduduk
- e. Bidang Pencatatan Sipil
- f. Bidang Data dan Informasi Kependudukan
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris dan tiap-tiap bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Visi dan Misi

1) Visi

Visi Dinas dan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru yaitu “Terwujudnya Kota Pekanbaru Sebagai Pusat Perdagangan dan Jasa, Pendidikan, serta Pusat Kebudayaan Melayu Menuju Masyarakat Sejahtera Yang Berlandaskan Iman dan Takwa”.

Visi DISDUKCAPIL cukup ringkas tetapi mengandung makna yang sangat mendalam:

- a. Pelayanan Administrasi Kependudukan adalah suatu usaha melayani semua pihak dalam pelaksanaan rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi

administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

- b. Tertib: mengandung arti bahwa dalam pelaksanaan penerbitan output dari kegiatan Administrasi Kependudukan diselenggarakan secara teratur.
- c. Cepat: yaitu suatu keinginan organisasi untuk menerbitkan dokumen kependudukan sesegera mungkin.
- d. Akurat: dokumen kependudukan yang diterbitkan memiliki kriteria tepat, benar, baik dan terpercaya.

2) Misi

Misi Disdukcipil

“Mewujudkan Pelayanan Penerbitan Dokumen dan Data Kependudukan yang Memenuhi Kepuasan Semua Pihak”.

2.1.6. Pengertian Kependudukan

Sebelum membahas mengenai kependudukan, maka ada baiknya mengerti penduduk terlebih dahulu. Penduduk merupakan suatu kumpulan masyarakat yang melakukan interaksinya dalam suatu daerah atau orang yang berhak tinggal di daerah, dengan syarat orang tersebut harus memiliki surat resmi untuk tinggal di wilayah tersebut, sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Pencatatan Perkawinan dan Pelaporan Akta Yang Diterbitkan Oleh Negara Lain mendefinisikan penduduk sebagai berikut: Penduduk adalah warga negara



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Indonesia atau orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Dari definisi tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa penduduk merupakan setiap orang atau sekelompok orang yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu dalam waktu yang telah ditentukan oleh Undang-undang.

Berdasarkan Multilingual Demographic Dictionary dalam Ida Bagus Mentra (2008:19) disebutkan demografi adalah sebagai berikut: Demografi mempelajari penduduk (suatu wilayah) terutama mengenai jumlah, struktur (komposisi penduduk) dan perkembangannya (perubahannya).

Sedangkan Philip M. Hauser dan Dudley Duncan (2010:92), demografi mempelajari jumlah, persebaran, teritorial dan komposisi penduduk serta perubahan – perubahannya dan sebab – sebab perubahan itu, yang biasanya timbul karena natalitas (fertilitas), mortalitas, gerakan teritorial (migrasi) dan mobilitas sosial (perubahan status).

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa demografi mempelajari struktur dan proses penduduk di suatu wilayah. Pertumbuhan penduduk di suatu wilayah juga merupakan ruang lingkup dari demografi. Pengertian pertumbuhan penduduk itu sendiri adalah perubahan populasi sewaktu-waktu, dan dapat dihitung sebagai perubahan dalam jumlah individu dalam sebuah populasi menggunakan "per waktu unit" untuk pengukuran.

2.1.7. Pengendalian Kependudukan

Seperti yang sudah dibahas sebelumnya mengenai definisi pengendalian, dimana pengendalian itu merupakan tindakan mengatur laju atau mengontrol jalannya suatu tindakan agar dapat berjalan dengan sistematis dan efisien serta mengacu kepada definisi kependudukan itu sendiri, dimana kependudukan itu mempelajari struktur dan proses yang ada dalam masyarakat, maka dapat kita simpulkan bahwa pengendalian kependudukan adalah usaha mempengaruhi pola kembang biak penduduk ke arah angka pertumbuhan penduduk yang diinginkan, biasanya ditempuh melalui suatu kebijakan pemerintah di bidang kependudukan.

Dalam mengatasi laju pertumbuhan penduduk, dilakukan pengendalian sosial dimana pengendalian sosial itu sendiri menurut Horton (2008:71) adalah segenap cara dan proses yang ditempuh oleh sekelompok orang atau masyarakat, sehingga para anggotanya dapat bertindak sesuai harapan kelompok atau masyarakat. Pengendalian sosial digunakan sebagai dasar untuk menanggulangi masalah pertumbuhan penduduk karena pengendalian sosial merupakan suatu mekanisme untuk mencegah penyimpangan sosial serta mengajak dan mengarahkan masyarakat untuk berperilaku dan bersikap sesuai norma dan nilai yang berlaku. Dengan adanya pengendalian sosial yang baik maka anggota masyarakat yang berperilaku menyimpang dapat memahami perlunya untuk mematuhi program-program pemerintah yang sudah ada.

Masalah kependudukan merupakan hal yang tidak bisa lepas dari negara kita, karena negara kita termasuk salah satu negara terbesar di dunia yang memiliki tingkat kepadatan penduduk yang cukup tinggi. Laju pertumbuhan di

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suatu negara berbanding lurus dengan tingkat perekonomian, kesehatan, sosial budaya, tingkat pendidikan, kesejahteraan maupun pembangunan. Dalam latar belakang sudah kita lihat bahwa pertumbuhan penduduk memegang peranan penting baik dalam hal pembangunan maupun kesejahteraan. Untuk Indonesia sendiri, menurut Faturohman dkk (2011:156) dikatakan bahwa masalah kependudukan yang sering muncul di Indonesia adalah jumlah dan pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi, penyebaran penduduk yang tidak merata, struktur umur penduduk yang berusia muda, urbanisasi yang relatif tinggi, serta kualitas sumber daya manusia rendah. Sejalan dengan yang diungkapkan Faturochman dkk, Darwin (2012:112) dalam pengendalian pertumbuhan penduduk dibandingkan dengan penambahan bahan makanan, kecuali terhambat oleh karena apa yang ia sebutkan sebagai moral restrains, seperti misalnya wabah penyakit atau malapetaka. Dalam pernyataan ini secara tidak langsung dikatakan bahwa jumlah pertumbuhan penduduk akan lebih besar daripada jumlah hasil bumi. Hal ini akan memunculkan permasalahan yang baru, dimana akan banyak terdapat masyarakat di bawah garis kemiskinan dan tidak mampu memenuhi kebutuhan pangan.

Sumber daya manusia/penduduk merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan dalam keberhasilan pembangunan. Siagian (2010:22) berpendapat “Jumlah penduduk yang besar dengan pertumbuhan penduduk yang tinggi merupakan modal dasar pembangunan, namun di sisi lain jumlah penduduk yang besar dengan pertumbuhan penduduk yang tinggi juga akan menjadi beban bagi suatu negara untuk memenuhi kebutuhan dasar penduduknya seperti sandang,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pangan dan papan maupun kebutuhan-kebutuhan lainnya. Jumlah dan pertumbuhan penduduk yang tinggi tersebut akan menjadi masalah dalam pembangunan yang pada akhirnya dapat menghambat proses pembangunan itu sendiri.

Usman (2008:91) menyatakan, “penduduk sebagai sumber daya manusia merupakan modal dasar yang penting dalam penyelenggaraan konsepsi ketahanan nasional, akan tetapi dalam kenyataannya, ledakan penduduk dapat menimbulkan tekanan yang besar pada sumber daya yang terbatas dan berpengaruh pada ketahanan nasional.” Penduduk yang besar dengan kualitas sumber daya manusia yang relatif kurang memadai sangat berpotensi memberikan beban dalam pembangunan, yang tercermin melalui beratnya beban pemerintah pusat dan daerah untuk menyediakan berbagai pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, lapangan kerja, dan lingkungan hidup.

Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa masalah pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali dapat menimbulkan masalah sosial seperti kemiskinan, rendahnya tingkat kesehatan, tekanan atau pengrusakan terhadap lingkungan, pengangguran dan juga gangguan keamanan, bahkan dapat pula menimbulkan peperangan antara satu negara dengan negara lainnya. Oleh karena itu diperlukan pengaturan sistem kependudukan yang baik agar masalah-masalah yang muncul dari problem kependudukan tidak berimbas pada terjadinya kriminalitas.

2.1.8. Kebijakan Pengelolaan Laju Pertumbuhan Penduduk

Setiap permasalahan khususnya dalam pemerintahan, menghasilkan suatu kebijakan, dimana kebijakan tersebut sering disebut dengan kebijakan publik. Nugroho (2009:54) mengartikan kebijakan publik tersebut sebagai keputusan yang dibuat oleh negara, khususnya pemerintah sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan negara yang bersangkutan. Dimana Kebijakan publik tersebut merupakan strategi untuk mengantar masyarakat pada masa awal, memasuki masyarakat pada masa transisi, dan untuk menuju masyarakat yang dicita-citakan.

Menurut Masruri (2010:215), kebijakan publik yang sering menjadi pembahasan di setiap negara adalah kebijakan kependudukan. Menurut PBB pengertian kebijaksanaan kependudukan adalah tindakan dan program yang disusun untuk membantu tercapainya tujuan-tujuan ekonomi, sosial, demografi, politik dan tujuan umum lainnya dengan jalan mempengaruhi variabel demografi umum, seperti besar dan pertumbuhan penduduk, persebaran geografis, serta ciri-ciri demografinya. Kebijakan pemerintah dalam bidang kependudukan dan lingkungan hidup adalah pembangunan yang bercirikan pembangunan yang berkelanjutan. Kebijakan kependudukan itu sendiri mencakup 3 aspek yakni kelahiran (fertilitas), kematian (mortalitas) dan perpindahan (migrasi).

Secara garis besar tujuan kebijakan kependudukan adalah memelihara keseimbangan antara pertambahan dan penyebaran penduduk dengan perkembangan pembangunan sosial-ekonomi, sehingga tingkat hidup layak dapat diberikan pada seluruh penduduk. Usaha ini meliputi seluruh kebijakan di bidang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ekonomi, sosial, budaya, dan kegiatan lain untuk meningkatkan pendapatan yang adil, kesempatan kerja dan pembangunan pendidikan menyeluruh. Strategi ini dapat dilakukan melalui program, baik itu jangka pendek maupun jangka panjang.

Peraturan Daerah merupakan salah satu produk peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Peraturan daerah adalah peraturan bersifat lokal yang berlaku di daerah tempat produk hukum tersebut dibentuk yakni daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota. Menurut Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dalam Pasal 1 angka 7 menyebutkan bahwa Peraturan Daerah Provinsi adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan Persetujuan bersama Gubernur.

Sedangkan Pasal 1 angka 8 menyebutkan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan Persetujuan Bupati/Walikota

Dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia, peraturan daerah dimaksud menjadi salah satu bagian dalam bentuk-bentuk peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan jenis dan hierarkhi Peraturan Perundang-undangan terdiri dari :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
4. Peraturan Pemerintah
5. Peraturan Presiden
6. Peraturan Daerah Provinsi dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam hal ini peraturan daerah secara tata urutan atau hirarki perundang-undangan sebagaimana diatur dalam undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, berada pada urutan bawah namun pengawasannya juga dilakukan sama seperti pengawasan terhadap peraturan perundang-undangan lainnya yang lebih tinggi oleh lembaga pemerintah pusat yang memiliki kapasitas untuk melakukan tugas pengawasan hukum. Pengawasan teknis bersifat evaluasi dilakukan sebelum suatu Peraturan Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah yaitu pengawasan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi. Oleh karena itu peraturan daerah tidak dapat dipandang sebagai produk hukum yang hanya bersifat lokal sehingga tidak perlu pengawasan atau dengan kata lain pemerintah daerah tidak boleh mengabaikan kewajiban untuk melakukan laporan kepada kelembagaan negara di tingkat pusat maupun pada daerah provinsi yang mempunyai kapasitas melakukan tugas tersebut.

Peraturan Daerah merupakan salah satu dari jenis peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dewasa ini. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menjadi landasan hukum untuk penyusunan peraturan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perundang-undangan termasuk juga peraturan lokal tadi yaitu peraturan daerah yang berlaku mengikat bagi daerah tempat peraturan daerah itu dibentuk. Peraturan Daerah merupakan produk hukum daerah yang ditetapkan oleh kepala daerah atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan dalam pelaksanaannya berlaku secara lokal, sehingga kekuatan mengikatnya hanya pada daerah dibentuk. Peraturan Daerah tetap mengacu pada peraturan hukum lebih tinggi di atasnya, sehingga tidak serta merta akan mengesampingkan aturan-aturan yang lebih tinggi. Prinsip peraturan daerah adalah untuk melaksanakan peraturan yang lebih tinggi di atasnya maka tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi tersebut. Oleh karena itu daya ikat dari Peraturan Daerah adalah hanya mengikat bagi setiap aspek-aspek kepentingan daerah, namun tidak berarti dengan berlaku mengikat secara lokal tersebut, sehingga pemerintah daerah menganggap bahwa pengawasan pemerintah terhadap peraturan daerah tidak ada.

Sebagai langkah pengendalian laju pertumbuhan penduduk, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru melaksanakan kegiatan pendataan penduduk pendatang bagi penduduk yang tinggal di wilayah Kota Pekanbaru tetapi tidak memiliki identitas penduduk (KTP_el) sesuai dengan domisilinya, karena perpindahan penduduk tersebut tidak dibarengi dengan proses pengurusan administrasi kependudukan sesuai dengan aturan yang berlaku. Berdasarkan hal tersebut, ditetapkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2008 tentang pembentukan susunan organisasi, kedudukan dan tugas pokok dinas-dinas dilingkungan pemerintah Kota Pekanbaru pada Pasal 19 dijelaskan mengenai kedudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
2. Dinas Kependudukan dan Pecatatan Sipil dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
3. Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Sekretariat Dinas dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
5. Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
6. Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas.
7. Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
8. Jumlah dan jenis jabatan fungsional akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

Dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2008 Pasal 20, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian Urusan Pemerintah Daerah Kota di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru sebagai salah satu perangkat daerah yang membantu Walikota dalam

menyelenggarakan roda pemerintahan khususnya di bidang Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki peranan yang sangat strategis dalam menyelenggarakan tertib administrasi kependudukan.

2.2. Defenisi Konsep

Konsep merupakan istilah dan defenisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial.²⁷ Tujuan adalah untuk memudahkan pemahaman dan menghindari terjadinya interpretasi ganda dari variable yang diteliti. Defenisi konsep bertujuan untuk menghindarkan interpretasi ganda atas variable yang diteliti. Oleh karena itu, untuk mendapatkan batasan-batasan yang jelas dari masing-masing konsep yang akan diteliti, maka defenisi konsep dalam penelitian ini adalah:

1. Peran adalah peran dinas dalam menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukan serta berdasarkan tugas pokok dan fungsinya. Oleh karena itu, peranan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam menanggulangi angka pertambahan penduduk di Kota Pekanbaru.
2. Pengendalian Kependudukan adalah usaha mempengaruhi pola kembang biak penduduk ke arah angka pertumbuhan penduduk yang diinginkan, biasanya ditempuh melalui suatu kebijakan pemerintah di bidang kependudukan.
3. Menanggulangi angka pertambahan penduduk adalah kegiatan membatasi pertumbuhan penduduk, umumnya dengan mengurangi jumlah kelahiran

dengan tujuan untuk mengatasi jumlah penduduk yang besar, tingkat pertumbuhan yang tinggi, penyebaran penduduk yang tidak merata, komposisi umur penduduk yang timpang, dan masalah mobilitas penduduk.

2.3. Kerangka Berfikir

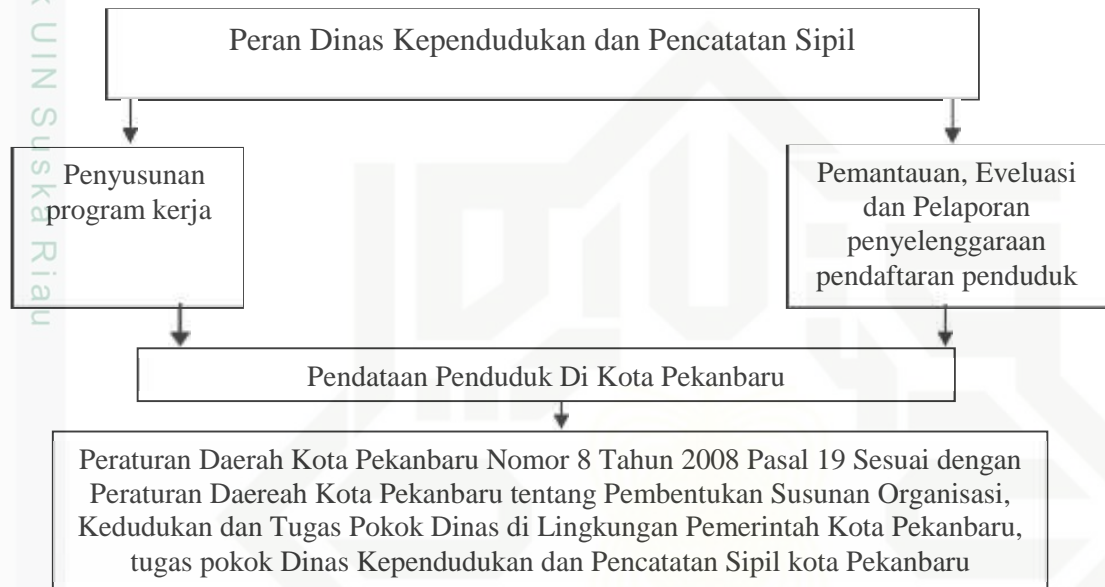
Kerangka pikiran merupakan penjelasan sementara terhadap gejala-gejala yang menjadi objek permasalahan. Adapun yang menjadi kerangka pikiran dalam penelitian mengenai analisis Peran Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Dalam Pendataan Penduduk di Kota Pekanbaru, sebagaimana dapat dilihat pada bagan kerangka pikir berikut:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 2.1

Kerangka Pikiran Analisis Peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dalam Pendataan Penduduk Kota Pekanbaru



Sumber: Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2008 Pasal 19

2.4. Konsep Operasional Variabel

Operasional variabel adalah defenisi yang diberikan kepada suatu variabel dengan cara memberikan arti atau mendefinisikan kegiatan atau memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur variabel tersebut (Sufian, 2008: 105).

Untuk menyelenggarakan peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam menanggulangi angka pertambahan penduduk di Kota Pekanbaru dapat dilihat dalam bentuk tabel, uraian konsep, variabel, indikator, dan skala yang dirancang untuk mendapatkan hasil penelitian yang baik, maka operasional variabel dapat dilihat pada tabel :

Tabel 2.1

Definisi Konsep Operasional Variabel Penelitian

Variabel	Indikator	Sub Indikator
Peran Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Dalam Pendataan Penduduk di Kota Pekanbaru Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2008 Pasal 19	1. Penysunan program kerja	1. Penyusunan program kerja kependudukan 2. Pencatatan dan Pemuktahiran biodata penduduk Penertiban KK dan KTP
	2. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan penyelenggara pendaftaran penduduk	1. Pemantauan Penyelenggara pendaftaran penduduk 2. Evaluasi Penyelenggara pendaftaran penduduk 3. Pelaporan Penyelenggara pendaftaran penduduk

Sumber: Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2008 Pasal 19



2.5 Pandangan Islam Tentang Pertumbuhan Penduduk

Istilah "proses" perkembangan yang digunakan dalam kajian ini untuk menunjukkan adanya tahapan, pola, aspek, faktor yang terlibat dalam perkembangan manusia. Perkembangan berarti segala perubahan kualitatif dan kuantitatif yang menyertai *pertumbuhan* dan proses *kematangan* manusia. Pertumbuhan dan kematangan merupakan pengertian umum dari perkembangan. Definisi tersebut menjelaskan pemahaman perkembangan dari sisi yang luas, sebagai "proses menyeluruh ketika individu beradaptasi dengan lingkungan." Adapun ruang lingkup definisi ini mencakup rentang kehidupan manusia diantaranya mencakup perkembangan prakelahiran, bayi, anak-anak, remaja, orang dewasa dan usia lanjut, serta kehidupan pascakematian. Menurut Salisu Shehu, pertumbuhan dan perkembangan merupakan proses yang gradual, memiliki pola tertentu, merupakan proses kumulatif dan simultan, melampaui keberadaan fenomenal duniawi, dan melewati periode kritis dan sensitif tertentu.

Allah menciptakan manusia dari berbagai tahap progresif pertumbuhan dan perkembangan. Dengan kata lain, kehidupan manusia memiliki pola dalam tahapan-tahapan tertentu termasuk tahapan dari pembuahan sampai kematian. Tahapan yang terjadi yang dilewati manusia dalam pertumbuhan dan perkembangannya terjadi bukan karena faktor peluang atau kebetulan, namun ini



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merupakan sesuatu yang dirancang, ditentukan dan ditetapkan langsung oleh Allah swt, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Furqaan ayat 2 di bawah ini:

Artinya: *"Yang kepunyaan-Nya-lah kerajaan langit dan bumi, dan dia tidak mempunyai anak, dan tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaan(Nya), dan Dia telah menciptakan segala sesuatu, dan dia menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya".* (QS. Al-Furqaan ayat2).

Hal ini menunjukkan bahwa kehidupan dari segala sesuatu telah ditentukan dengan cara demikian rupa sehingga setiap aspek secara proporsional terlengkapi. Dalam pertumbuhan dan perkembangan manusia tidak terjadi serta merta dalam satu waktu, namun melalui tahapan yang telah ditentukan ukurannya yang membuatnya berjalan dalam proses yang berangsur-angsur atau gradual.

Menurut Al-Qur'an, pertumbuhan dan perkembangan manusia memiliki pola umum yang dapat diterapkan pada manusia, meskipun terdapat perbedaan individual. Pola yang terjadi adalah bahwa setiap individu tumbuh dari keadaan yang lemah menuju keadaan yang kuat dan kemudian kembali melemah. Dengan kata lain, pertumbuhan dan perkembangan, sesuai dengan hukum alam, ada kenaikan dan penurunan. Ketika seseorang secara berangsur-angsur mencapai puncak perkembangannya, baik fisik maupun kognitif, dia mulai menurun berangsur-angsur. Al-Qur'an menyatakan sebagai berikut:

Artinya: *"Allah, Dialah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah, kemudian Dia menjadikan (kamu) sesudah keadaan lemah itu menjadi kuat, kemudian Dia menjadikan (kamu) sesudah kuat itu lemah (kembali) dan beruban.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dia menciptakan apa yang dikehendaki-Nya dan Dialah yang Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa". (QS. Ar-Rum:54)

Artinya: "Allah menciptakan kamu, kemudian mewafatkan kamu; dan di antara kamu ada yang dikembalikan kepada umur yang paling lemah (pikun), supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatupun yang pernah diketahuinya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa". (QS. Al-Nahl:70)

Dengan demikian, terlihat bahwa pola yang disebutkan dalam ayat ini dapat diterapkan pada semua manusia. Hal ini mengacu pada tahap pertama penciptaan manusia di dalam rahim sampai persalinan. Manusia sangat lemah dalam tahap awal ini, baik secara fisik maupun mental. Lemahnya manusia pada awal kehidupan ini juga mencakup pada lemahnya keadaan mental seseorang.

Jika teori psikologi modern hanya mencakup kehidupan duniawi yang sementara, Al-Qur'an memproyeksikan kehidupan manusia di atas kehidupan ini. Al-Qur'an mengkaji kehidupan saat ini sebagai dasar kehidupan lain yang lebih permanen dan kekal. Manusia akan mengalami transformasi kepada bentuk kehidupan lain yang pertumbuhan dan perkembangannya bersifat transendental dan lebih tinggi.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan dengan cara metode survey yakni penulis melakukan penelitian secara langsung ke tempat penelitian dengan cara observasi dan wawancara dalam penelitian ini mengenai peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam Pendataan Penduduk di Kota Pekanbaru yang beralamat Jl. Jend. Sudirman No. 464.

3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang ada, maka penelitian ini dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru mengenai peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam Pendataan Penduduk di Kota Pekanbaru, dikarenakan masih terdapatnya fenomena terkait administrasi kependudukan di daerah tersebut. Penelitian ini direncanakan dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru dari Bulan Desember 2016 s/d selesai.

3.3. Informen Penelitian dan Sumber Data

Key Informen (narasumber) penelitian adalah seseorang yang karena memiliki informasi (data) banyak mengenai objek yang sedang diteliti, dimintai informasi mengenai objek penelitian tersebut. Lazimnya informan atau narasumber penelitian ini ada dalam penelitian yang subjek penelitiannya berupa kasus. Antara lain, yang berupa lembaga atau organisasi atau institusi (pranata) sosial. Diantara sekian banyak informen tersebut, ada yang disebut narasumber kunci (key informen) seorang ataupun beberapa orang, yaitu orang atau orang-orang yang paling banyak menguasai informasi mengenai objek yang sedang

diteliti tersebut.

Informen penelitian ini meliputi tiga macam yaitu (1) informen kunci, (key informen), yaitu mereka yang mengetahui dan memiliki informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian, (2) informen biasa, (3) informen tambahan, yaitu mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang sedang diteliti (Hendarso dan Suyanto, 2005: 171-172).

Sumber data utama dalam penelitian ini yaitu kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah tambahan seperti dokumen lainnya. Dengan demikian sumber data dalam penelitian ini berupa kata-kata dan tindakan sebagai sumber utama, sedangkan sumber data tertulis, foto dan catatan tertulis adalah sumber data tambahan.

Adapun informen yang akan diteliti yaitu :

Tabel 3.1 : Data Informen

No.	Keterangan	Sampel
1.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru	1
2.	Ka. Bidang Pengendalian dan Pengawasan Penduduk	1
3.	Seksi Pengendalian dan Pengawasan Penduduk	15
Jumlah		17

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, 2016.

Disamping itu peneliti juga menggunakan masyarakat sebagai informen untuk mengkroscek atau memperdalam informasi dari sampel.

3.4. Teknik pengumpulan data

Untuk mendapatkan atau mengumpulkan data yang diperoleh dalam penelitian ini digunakan dengan cara-cara:

1. Observasi yaitu suatu penyelidikan yang dijalankan secara sistematis dan sengaja diadakan dengan menggunakan alat indra terutama mata terhadap kejadian yang langsung.
2. Wawancara yaitu percakapan yang dilakukan oleh pewawancara yang mengajukan angket pertanyaan yang di tujukan kepada masyarakat. Wawancara dilakukan agar memperoleh kejelasan sehingga dapat dijadikan sebagai bahan acuan pada hasil quisioner yang disebarkan. Wawancara dilakukan dengan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, Kasi Pelayanan dan masyarakat yang sedang/telah melakukan pengurusan administrasi kependudukan.
3. Dokumentasi studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan content analysis. Teknik dokumentasi tersebut dilakukan dengan cara mencatat dokumen atau arsip-arsip yang mempunyai keterkaitan dan dibutuhkan pada penelitian ini serta untuk dapat mencocokkan dan melengkapi studi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Sehingga peneliti dapat mendalami

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

permasalahan yang sedang diteliti serta data yang akurat bisa dipadatkan.

3.4.1 Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan lapangan (Miles dan Huberman (1992:16)). Langkah-langkah yang dilakukan adalah menajamkan analisis, menggolongkan atau pengkategorisasian kedalam tiap permasalahan melalui uraian singkat, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data sehingga dapat ditarik dan diverifikasi. Data yang direduksi antara lain seluruh data mengenai permasalahan penelitian. Data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih spesifik dan mempermudah peneliti melakukan pengumpulan data selanjutnya serta mencari data tambahan jika diperlukan. Semakin lama peneliti berada di lapangan maka jumlah data akan semakin banyak, semakin kompleks dan rumit. Oleh karena itu, reduksi data perlu dilakukan sehingga data tidak bertumpuk agar tidak mempersulit analisis selanjutnya.

3.4.2 Penyajian Data

Setelah data direduksi, langkah analisis selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data merupakan sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. (Miles dan Huberman, 1992:17). Penyajian data diarahkan agar data hasil reduksi terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan sehingga makin mudah dipahami. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian naratif, bagan, hubungan antar kategori serta diagram alur. Penyajian data dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bentuk tersebut mempermudah peneliti dalam memahami apa yang terjadi. Pada langkah ini, peneliti berusaha menyusun data yang relevan sehingga informasi yang didapat disimpulkan dan memiliki makna tertentu untuk menjawab masalah penelitian. Penyajian data yang baik merupakan satu langkah penting menuju tercapainya analisis kualitatif yang valid dan handal.

3.4.3 Menarik Kesimpulan atau Verifikasi

Tahap ini merupakan tahap penarikan kesimpulan dari semua data yang telah diperoleh sebagai hasil dari penelitian. Penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah usaha untuk mencari atau memahami makna/arti, keteraturan, pola-pola, penjelasan, alur sebab akibat atau proposisi. Sebelum melakukan penarikan kesimpulan terlebih dahulu dilakukan reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan atau verifikasi dari kegiatan-kegiatan sebelumnya. Sesuai dengan pendapat Miles dan Huberman, proses analisis tidak sekali jadi, melainkan interaktif, secara bolak-balik diantara kegiatan reduksi, penyajian dan penarikan kesimpulan atau verifikasi selama waktu penelitian. Setelah melakukan verifikasi maka dapat ditarik kesimpulan berdasarkan hasil penelitian yang disajikan dalam bentuk narasi. Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dari kegiatan analisis data. Penarikan kesimpulan ini merupakan tahap akhir dari pengolahan data.

3.5. Jenis Data

Data yang digunakan guna menunjang hasil penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

1. Data Primer.

Adalah data yang penulis peroleh secara langsung dari responden melalui kuesioner dan wawancara yang dilakukan dengan responden tentang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru.

2. Data Sekunder.

Adalah data yang penulis peroleh dari berbagai dokumen-dokumen, literatur-literatur dan pendapat para ahli yang berhubungan dengan penelitian ini.

3.6. Analisis Data

Setelah penulis memperoleh data dari hasil wawancara dengan responden, kemudian data yang terkumpul dikelompokkan dalam bagiannya sesuai dengan bagian data tersebut dan kemudian diuraikan dalam bentuk kalimat. Selanjutnya penulis sajikan dalam dua bentuk yaitu untuk data yang bersifat kuantitatif akan disajikan dalam bentuk uraian-uraian kalimat yang lengkap dan rinci. Setelah itu data tersebut penulis analisis dan dibahas dengan memperhatikan teori-teori atau aturan-aturan yang mengaturnya dan didapat suatu kesimpulan dengan cara induktif yaitu dari yang bersifat khusus menuju ke yang umum.

Untuk memberikan gambaran data hasil penelitian maka dilakukan prosedur sebagai berikut :

1. Tahap penyajian data : data disajikan dalam bentuk deskripsi yang terintegrasi.
2. Tahap komparasi : merupakan proses membandingkan hasil analisis data yang telah deskripsikan dengan interpretasi data untuk menjawab

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Letak dan Luas Daerah

Kota Pekanbaru adalah ibu kota dan kota terbesar di provinsi Riau, Indonesia. Kota ini merupakan kota perdagangan dan jasa, termasuk sebagai kota dengan tingkat pertumbuhan, migrasi, dan urbanisasi yang tinggi. Pekanbaru mempunyai satu bandar udara internasional yaitu Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II dan juga mempunyai bus terminal antar kota dan antar provinsi Bandar Raya Payung Sekaki, serta dua pelabuhan di Sungai Siak, yaitu Pelita Pantai dan Sungai Duku. Saat ini Kota Pekanbaru sedang berkembang pesat menjadi kota dagang yang multi-etnik, keberagaman ini telah menjadi kepentingan bersama untuk dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakatnya. Kota Pekanbaru memang tengah tumbuh dengan baik. Berbagai pembangunannya makin bergeliat. Hal ini dapat kita lihat pada Sasana Purna MTQ yang sangat artistik dan indah dari segi arsitekturnya. Saat ini gedung ini sering dipakai sebagai pusat pameran kesenian dan bisnis.

Nama Pekanbaru dahulunya dikenal dengan nama “Senapelan” yang pada saat itu dipimpin oleh seorang kepala suku disebut batin. Daerah yang mulanya sebagai , lambat laun menjadi perkampungan. Kemudian perkampungan senapelan berpindah ke tempat pemukiman baru yang kemudian disebut dusun Payung Sekaki yang terletak di tepi muara sungai siak. Nama payung sekaki tidak begitu dikenal pada masanya melainkan Senapelan. Perkembangan Senapelan berhubungan erat dengan perkembangan Kerajaan Siak Sri Indrapura. Semenjak



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah menetap di Senapelan, beliau membangun istananya di Kampung Bukit berdekatan dengan perkampungan Senapelan. Diperkirakan istana tersebut terletak di sekitar Masjid Raya sekarang. Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah mempunyai inisiatif untuk membuat pekan di senapelan tetapi tidak berkembang.

Usaha yang telah dirintis tersebut kemudian dilanjutkan oleh putranya Raja Muda Muhammad Ali ditempat baru yaitu disekitar pelabuhan sekarang. Selanjutnya pada hari selasa tanggal 21 rajah 1204H atau tanggal 23 juni 1784M berdasarkan musyawarah datuk datuk 4 suku (pesisir, limapuluh, tanah datar dan kampar), negri Senapelan diganti namanya menjadi “Pekanbaru” selanjutnya diperingati sebagai hari lahir kota Pekanbaru. Mulai saat itu sebutan Senapelan sudah ditinggalkan dan mulai populer sebutan “PEKAN BAHARU”, yang dalam bahasa sehari-hari disebut Pekanbaru.

Perkembangan selanjutnya tentang pemerintahan di Kota Pekanbaru selalu mengalami perubahan, antara lain:

- 1) SK Kerajaan Besluit van Her InlancheZelf Bestuur van Siak No.1 tanggal 19 Oktober 1919, Pekanbaru bagian dari kerajaan siak yang disebut District.
- 2) Tahun 1913 Pekanbaru masuk wilayah Kampar Kiri dikepalai oleh seorang Controleur berkedudukan di Pekanbaru.
- 3) Tanggal 8 maret 1942 Pekanbaru dikepalai oleh seorang Gubernur Militer disebut Gokung, Distrik menjadi Gun dikepalai oleh Gunco.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Ketetapan Gubernur Sumatra di Medan tanggal 17 mei 1946 no. 103 Pekanbaru di jadikan daerah otonom yang disebut Haminte atau Kota B.
- 5) UU NO.22 tahun 1948 Kabupaten Pekanbaru di ganti menjadi Kabupaten Kampar, Pekanbaru diberi status kota kecil.
- 6) . UU NO. 8 tahun 1956 menyempurnakan status kota pekanbaru sebagai kota kecil.
- 7) UU NO.1 tahun 1957 status pekanbaru menjadi kota Praja.
- 8) Kepmendagri no. Desember 52 / I / 44 – 25 tanggal 20 Januari 1959 Pekanbaru Menjadi ibu kota provinsi Riau.
- 9) UU NO. 18 tahun 1965 resmi pemakaian sebutan kotamadya.
- 10) UU NO.22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah sebutan kotamadya berubah menjadi kota.

Kota Pekanbaru merupakan Ibukota provinsi Riau yang mempunyai jarak lurus dengan kota-kota lain sebagai Ibukota provinsi lainnya sebagai berikut:

Tabel 4.1 : Jarak dari Kota Pekanbaru dan Kabupaten yang ada di Kota Pekanbaru

DARI	Kabupaten	Jarak
PEKANBARU	Taluk kuantan	118 Km
	Rengat	159 Km
	Tembilahan	213,3 Km
	Kerinci	33,5 Km

Siak	74,5Km
Bangkinang	51 Km
Pasir Pangaraian	132,5 Km
Bengkalis	128 Km
Bagan	192,5 Km
Dumai	125 Km

Sumber : BPS Kota Pekanbaru, 2018.

4.2 Sejarah Ringkas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru

Berdasarkan keputusan Presiden No. 12 tahun 1983 bahwa penyelenggaraan Catatan Sipil yang semula merupakan tanggung jawab Departemen Kehakiman, dialihkan menjadi kewenangan dan tanggung jawab Departemen Dalam Negeri petugas pencatatannya dinamakan Pegawai Negeri Sipil.

Pegawai tersebut ditunjuk dan diberi wewenang untuk menyelenggarakan pencatatan yang dilakukan dengan membuat akta di dalam daftar yang sudah ditentukan dengan masing-masing peristiwa sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan. Akta Pencatatan Sipil merupakan akta otentik, yang di dalam hukum pembuktian mempunyai kekuatan Yuridis bukti diri seseorang.

Sejalan dengan perkembangan Administrasi Catatan Sipil, makan dengan surat keputusan Menteri Dalam Negeri No. 51 tahun 1993 Kantor Catatan Sipil Kotamadya Pekanbaru dialihkan statusnya dari tipe C menjadi tipe B dan untuk kegiatan operasionalnya ditindaklanjuti dengan surat Keputusan Gubernur, Kepala

Daerah Tingkat I Riau No 698/IX/1993 tentang Struktur Organisasi Kantor Catatan Sipil tipe B Kotamadya Daerah tingkat B Pekanbaru.

Dengan Peraturan Pemerintah No. 84 tahun tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas dan selanjutnya ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 7 tahun 2001 tentang Pembentukan Struktur Organisasi Tata Kerja Dinas, maka secara resmi urusan Pencatatan Sipil yang dilaksanakan oleh Kantor Catatan Sipil menjadi kewenangan Dinas Pendaftaran Penduduk yang tugas operasionalnya berdasarkan Peraturan Daerah No 8 tahun 2000 tentang Pendaftaran Penduduk Jo Kpts. Walikota Pekanbaru No 2 tahun 2002 tanggal 24 Januari 2002 tentang Penatausahaan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dalam Kota Pekanbaru yaitu kegiatan pendaftaran penduduk, Pencatatan Sipil dan Pengolaan Informasi Kependudukan.

Selanjutnya dengan diberlakukannya Peraturan Daerah No 5 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Peraturan Daerah No 6 tahun 2008 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Blangko KK dan KTP maka mulai tanggal 6 Januari 2009 penanda tanganan dokumen Kependudukan (KK dan KTP) di lingkungan pemerintah Kota Pekanbaru dilaksanakan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru.

4.3 Struktur Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru

1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai rincian tugas :
 - a. Merumuskan kebijakan teknis dalam bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan mengelola informasi administrasi kependudukan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan informasi administrasi kependudukan
- c. Membina dan melaksanakan tugas pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil
- d. Menyelenggarakan urusan penatausahaan dinas
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam

menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang kependudukan dan pencatatan sipil
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum
- c. Penyusunan rencana kerja, pemantauan dan evaluasi

Sekretaris mempunyai rincian tugas :

- a. Menyusun rencana kerja dan membuat laporan tahunan
- b. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan program kerja tahunan di lingkungan dinas
- c. Mewakili kepala dinas apabila yang bersangkutan berhalangan atau tidak berada ditempat

Sekretaris dalam menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program kerja dinas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Pelaksanaan koordinasi pelayanan administrasi dinas
- c. Pengkoordinasian rapat dinas dan keprotokolan
3. Sub Bagian Kepegawaian, Umum dan Perlengkapan mempunyai rincian tugas:
 - a. Menyusun program kerja dan membuat laporan tahunan
 - b. Merumuskan dan melaksanakan pelayanan administrasi inventaris kantor dan dokumentasi kegiatan kantor
 - c. Merumuskan dan melaksanakan kegiatan dokumentasi serta pengolahan data dan informasi yang berhubungan dengan bidang kepegawaian, umum dan perlengkapan

Sub Bagian Kepegawaian, Umum dan Perlengkapan dalam menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan program kerja sub bagian kepegawaian, umum dan perlengkapan
- b. Penyelenggaraan pelayanan administrasi sub bagian kepegawaian, umum dan perlengkapan
- c. Pengevaluasian tugas administrasi administrasi sub bagian kepegawaian, umum dan perlengkapan
4. Sub Bagian Keuangan mempunyai rincian tugas :
 - a. Merumuskan dan mengkoordinasikan pembinaan bidang keuangan
 - b. Melakukan verifikasi serta meneliti kelengkapan surat permintaan pembayaran
 - c. Menyiapkan surat perintah membayar

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sub Bagian Keuangan dalam menyelenggarakan fungsi :

- a. Pembuatan konsep pedoman dan petunjuk teknis
- b. Pengevaluasian tugas
- c. Pelaporan pelaksanaan tugas

Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai rincian tugas :

- a. Menyusun program kerja dan membuat laporan tahunan
- b. Merumuskan dan melaksanakan pengendalian dan pelaporan
- c. Membuat konsep pedoman dan petunjuk teknis

Sub Bagian Penyusunan Program dalam menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program kerja
 - b. Pengumpulan data dan informasi
 - c. Pengendalian dan pelaporan
6. Bidang Perencanaan dan Perkembangan Kependudukan mempunyai rincian tugas :
- a. Menetapkan kebijakan perencanaan dan perkembangan kependudukan
 - b. Menyusun dan merekomendasikan kebijakan kependudukan daerah dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah
 - c. Menyelenggarakan kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan dalam rangka tertib administrasi kependudukan

Bidang Perencanaan dan Perkembangan Kependudukan dalam menyelenggarakan fungsi :

- a. Menetapkan kebijakan perencanaan dan perkembangan kependudukan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- b. Penyusunan dan merekomendasi kebijakan kependudukan
 - c. Penyelenggaraan kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan
7. Seksi Perencanaan Kependudukan mempunyai rincian tugas :
- a. Menetapkan kebijakan perencanaan kependudukan
 - b. Menyusun dan merekomendasikan kebijakan kependudukan daerah dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah
 - c. Menyelenggarakan kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan dalam rangka tertib administrasi kependudukan

Seksi Perencanaan Kependudukan dalam menyelenggarakan fungsi :

- a. Menyusun program kerja
 - b. Perencanaan pembangunan
 - c. Penyusunan merekomendasi kebijakan kependudukan
8. Seksi Perkembangan dan Persebaran mempunyai rincian tugas :
- a. Menetapkan kebijakan perkembangan kependudukan
 - b. Menetapkan norma, standar, prosedur dan kriteria penyelenggaraan pengendalian kuantitas pengarah mobilitas dan persebaran serta perlindungan penduduk
 - c. Membuat analisis pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarah mobilitas atau penataan persebaran dan perlindungan penduduk serta pembangunan berwawasan kependudukan

Seksi Perkembangan dan Persebaran dalam menyelenggarakan fungsi :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Penyusunan program
 - b. Menetapkan kebijakan perkembangan kependudukan
 - c. Pengkoordinasian kebijaksanaan pengendalian kuantitas produk
9. Seksi Pemantauan dan Evaluasi mempunyai rincian tugas :
- a. Menilai dan melaporkan kinerja pembangunan kependudukan secara priodik
 - b. Mengawasi indikator kependudukan proyeksi penduduk dan analisis dampak kependudukan serta penyesuaian kebijakan kependudukan
 - c. Memantau, mengevaluasi dan melaporkan indikator penduduk, analisis dampak kependudukan

Seksi Pemantauan dan Evaluasi dalam menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program kerja
 - b. Penilaian dan pelaporan kinerja
 - c. Pengawasan indikator kependudukan
10. Bidang Pendaftaran Penduduk mempunyai rincian tugas :
- a. Menatausahaan pendaftaran penduduk
 - b. Menerbitkan dokumen pendaftaran penduduk lainnya
 - c. Membina dan mengembangkan sumber daya manusia pengelolaan pendaftaran penduduk

Bidang Pendaftaran Penduduk dalam menyelenggarakan fungsi :

- a. Pemuktahiran biodata penduduk
- b. Pendaftaran orang asing

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Penerbitan kartu keluarga dan kartu tanda penduduk

Seksi Identitas Penduduk mempunyai rincian tugas :

- a. Mencatat dan memuktahiran biodata penduduk serta penerbitan NIK
- b. Melaksanakan penerbitan kartu keluarga dan kartu tanda penduduk
- c. Mendaftarkan perubahan alamat dan biodata penduduk

Seksi Identitas Penduduk dalam menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program kerja
Pencatatan dan pemuktahiran biodata penduduk
- c. Penerbitan kartu keluarga dan Kartu Tand Penduduk

12. Seksi Mutasi Penduduk mempunyai rincian tugas :

- a. Mendaftarkan pindah datang penduduk dalam wilayah Republik Indonesia
- b. Mendaftarkan warga Negara Indonesia tinggal sementara
- c. Mendaftarkan orang asing tinggal sementara dan tinggal tetap

Seksi Mutasi Penduduk dalam menyelenggarakan fungsi :

- a. Pendaftaran pindah datang penduduk
- b. Pendaftaran warga Negara Indonesia
- c. Pendaftaran orang asing

13. Seksi Pengendalian dan Pengawasan Penduduk mempunyai rician tugas:

- a. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. mengawasi dan mengendalikan atas pengelolaan pendaftaran penduduk melalui yustisi kependudukan
- c. memantau, merevolusi dan melaporkan penyelenggaraan pendaftaran penduduk

Seksi pengendalian dan pengawasan penduduk dalam menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengendalian penduduk melalui yustisi
- b. Penyusunan program kerja
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pendaftaran penduduk.

14. Bidang Pencatatan Sipil mempunyai rincian tugas :

- a. mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pencatatan dan penerbitan akta perkawinan non muslim dan campuran, pencatatan dan penerbitan akta perceraian non muslim dan campuran
- b. mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pencatatan perubahan dan pembatalan akta pencatatan peristiwa penting lainnya
- c. mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pencatatan dan penerbitan akta pengakuan anak, pencatatan pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan status kewarganegaraan.

Bidang Pencatatan Sipil dalam menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengorganisasian berkaitan dengan kelahiran dan kematian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- b. Pembinaan dan merumuskan pencatatan dan penertibsn akta perkawinan
- c. Perumusan pencatatan dan penertiban dokumen

15. Seksi Kelahiran dan Kematian mempunyai rincian tugas :

- a. Mencatat dan menerbitkan akta kelahiran
- b. Mencatat dan menerbitkan akta kematian
- c. Mencatat dan menerbitkan dokumen dan surat keterangan yang berkaitan dengan kelahiran dan kematian

Seksi Kelahiran dan Kematian dalam menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program kerja
- b. Pencatatan dan menerbitkan akta akta kelahiran
- c. Pencatatan dan menerbitkan akta akta kematian

16. Seksi Perkawinan dan Perceraian mempunyai rincian tugas :

- a. Mencatat dan menerbitkan akta perkawinan non muslim dan campuran
- b. Mencatat dan menerbitkan akta perceraian non muslim dan campuran
- c. Melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Seksi Perkawinan dan Perceraian dalam menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program kerja
- b. Pencatatan dan penertiban akta perkawinan
- c. Pencatatan dan penertiban akta perceraian

17. Seksi Pencatatan Sipil Lainnya mempunyai rincian tugas :

- a. Mencatat dan menerbitkan akta pengakuan anak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Mencatat peristiwa penting lainnya
- c. Mencatat perubahan dan pembatalan akta

Seksi Pencatatan Sipil menyelenggarakan fungsinya :

- a. Penyusunan program kerja
- b. Penertiban akta pengakuan anak
- c. Pencatatan perubahan dan pembatalan akta

18. Bidang Data dan Informasi kependudukan mempunyai rincian tugas :

- a. Membangun bank data kependudukan
- b. Meyuluh dan membina administrasi kependudukan
- c. Menyajikan dan mendesiminasi informasi kependudukan

Bidang Data dan Informasi dalam menyelenggarakan fungsi :

- a. Pemeliharaan dan perawatn perangkat SIAK
- b. Penyediaan perangkat keras dokumen kependudukan
- c. Pembangunan dan pengembangan jaringan komunikasi data

19. Seksi Pendataan dan Pelaporan mempunyai rincian tugas :

- a. Merekam data hasil pelayanan pendaftaran dan pencatatan sipil serta pemuktahiran data penduduk dengan menggunakan SIAK
- b. Mengevaluasi dan pelaporan pengelolaan informasi administrasi kependudukan
- c. Membangun bank data kependudukan

Seksi Pendataan dan Pelaporan dalam menyelenggarakan fungsi :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- a. Penyusunan program kerja
- b. Pelaksanaan tugas tugas lain
- c. Evaluasi dan pelaporan

20. Seksi Jaringan Komunikasi mempunyai rincian tugas :

- a. Membangun dan mengembangkan jaringan komunikasi data
- b. Menyusun program kerja
- c. Menyediakan dokumen yang diperlukan oleh

pimpinan Seksi Jaringan Komunikasi dalam menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengembangan jaringan komunikasi data
- b. Pemeliharaan dan perawatan perangkat SIAK
- c. Pelaksanaan tugas tugas lain

21. Seksi Informasi dan Penyuluhan mempunyai rincian tugas :

- a. Menyuluh dan membina administrasi kependudukan
- b. Meninventaris permasalahan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah
- c. Menyediakan dokumen yang diperlukan oleh pimpinan

Seksi Informasi dan Penyuluhan dalam menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program kerja
- b. Penyuluhan administrasi kependudukan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI

KESIMPULAN

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan analisa penelitian serta pembahasan yang penulis lakukan maka pada bab ini penulis dapat mengambil kesimpulan diantaranya :

1. Peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru dalam pengendalian dan pengawasan penduduk di kota pekanbaru secara teknis dibidang kependudukan dan pencatatan sipil baik meliputi penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum maupun pemyusunan rencana kerja , pemantauan dan evaluasi kerja setiap aspek yang ada sehingga jalannya penyelenggraan dalam pencatatan kependudukan di sini dapat berjalan dengan baik, penerapan ini sesuai dengan pembentukan struktur tata kerja secara resmi dalam pencacatan sipil yang dilaksanakan oleh kantor catatan sipil kota menjadi kewenangan dinas pendaftaran penduduk yang tugas oprasionalnya sesuai berdasarkan peraturan Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2008 Pasal 19 Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru tentang Pembentukan Susunan Organisasi , Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru , tugas pokok dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Pekanbaru.
2. Hambatan dan kendala dalam pelaksanaan peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dalam Pengendalian dan Pengawasan Penduduk di Kota

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pekanbaru, Waktu penerbitan dokumen Administrasi Kependudukan yang masih belum sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan. Selanjutnya masalah yang lain yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam menyelenggaraan pelayanan Administrasi Kependudukan kepada masyarakat masih lambat dan masih terkesan sulit dipahami oleh sebagian masyarakat mengenai prosedur yang harus mereka lewati dan syarat yang harus mereka penuhi. Dilihat dari Waktu Produk Pelayanan ditemui permasalahan yakni perangkat keras (hardware) yang dipakai untuk mendukung operasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan belum memenuhi persyaratan teknis pengoperasian, misalnya hard disk terlalu kecil, akibat data image (photo, tandatangan dan sidik jari pemohon) disimpan secara terpisah di optical Disk, selain itu hasil scanning photo tidak sesuai dengan aslinya. Kurangnya sosialisasi iklan layanan masyarakat yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui media cetak dan elektronik, komunikasi, informasi dan edukasi kepada seluruh lapisan masyarakat sehingga kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan masih kurang. Kurangnya kepemilikan persyaratan untuk pembuatan akta kelahiran (tidak adanya bukti kelahiran dari penolong kelahiran, tidak dimilikinya Buku nikah/Akta Pernikahan Orang tua dll).

Kualitas pelayanan administrasi kependudukan pada UPT Disdukcapil masih belum optimal. Berdasarkan hasil penelitian masih

ditemukan dimana unsur-unsur kualitas pelayanan publik belum berjalan sebagaimana mestinya. Unsur *reliability & responsibility* dan *tangible aspect* merupakan unsur yang harus diperhatikan dalam meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan. Selain itu untuk meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan, pemerintah daerah kota Pekanbaru perlu mempertimbangkan aspek pemanfaatan dan pengembangan teknologi informasi dalam pelayanan administrasi kependudukan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6.2. Saran

1. Untuk lebih meningkatkan sarana dan prasana pendukung dalam melengkapi fasilitas didalam Kota Pekanbaru sehubungan dengan pesatnya jumlah pertumbuhan penduduk didalam kota seperti fasilitas jalan serta aturan yang terkait dengan dampak yang ditimbulkan dari tingginya jumlah pertumbuhan penduduk. Karna dibutuhkan keseimbangan dengan laju pertumbuhan penduduk dengan fasilitas tersedia di Kota Pekanbaru
2. Manusia tidak luput dari masalah termasuk dampak yang dapat ditimbulkan dengan makin pesat nya laju pertumbuhan baik itu masalah pribadi maupun masalah kependudukan (social). Banyak permasalahan kependudukan yang telah disebutkan, diantaranya tindak kejahatan , kepadatan penduduk dan lainnya , Tinggal bagaimana masing-masing individu atau suatu masyarakat menyelesaikan masalah dengan solusi yang baik. Dan kendaklah kita sebagai warga masyarakat selalu aktif terlibat dalam menyelesaikan permasalahan kependudukan tersebut.
3. Lebih meningkatkan kesadaran masyarakat dan peningkatan program pemerintah dalam menghadapi lonjakan tingginya jumlah penduduk dari factor tingginya tingkat kelahiran maupun imigrasi dengan memperhatikan kondisi dalam segala aspek terkait dan yang dapat ditimbulkan dari hal ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul kadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung : Cipta Aditya Bakti.
- Agustino, Leo. 2014. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Cetakan Kelima. Bandung. Alfabeta
- Ali, Fariddkk. 2012. *Studi Analisa Kebijakan*. Cetakan Kesatu. Bandung : PT Refika Aditama
- Amiruddin dan Zaenal Asikin. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. PT. Renika Cipta, Jakarta.
- Adi, Rianto, 2018, *Hukum dan Masalah Kependudukan*, Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.
- Bungin, Burhan. 2015. *Penelitian Kualitatif*. Prenada Media Grup : Jakarta
- Muhammad Nazir. 2011. *Metode penelitian*. PT. Ghalia Indoensia, Jakarta.
- Dessler, Gary. 2006. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Indeks.
- Irianto, Agus, 2018, *Demografi dan Kependudukan*. Prenada Media Group, Jakarta.
- Mangkunegara, A.A. Anwar Prabu, 2012, *Manajemen Sumber Daya*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Manullang, M. 2005, *Dasar-Dasar Manajemen*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

- Mathis, Robert L. dan Jackson, John H, 2011, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Salemba Empat, Jakarta.
- Moenir, H,a.s., 2008, *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Nasution, S, 2012, *Metode Research*, Bumi Aksara Jakarta.
- Nawawi, Hadari, 2010, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Ndraha Taliziduhu, 2008, *Dimensi-Dimensi pemerintahan Desa*, Bumi Aksara Jakarta
- Rasyid, Ryas, 2010, *Makna Pemerintahan Tinjauan dari Segi Etika dan Kepemimpinan*, Yasrif Watampone, Jakarta.
- Rusli, Said,2012,*Pengantar Ilmu Kependudukan*, Pustaka LP3ES, Jakarta.
- Siagian, Sondang P.2006, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Cetakan ketiga belas, Bumi Aksara, Jakarta.
- Sugiyono, 2004, *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta, Bandung,
- Soerjono Soekanto. 2001. *Sosiologi Suatu Pengantar*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soerjono Soekanto. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press, Jakarta.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Administrasi*. Alfabeta : Bandung
- Sugiyono.2016.*Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*.Alfabeta :

Bandung

Tjiptono, Fandy, 2008, *Manajemen Jasa*, Andi Offset, Yogyakarta.

Wasistiono, Sadu dkk, 2008, *Menata Ulang Kelembagaan Pemerintah*, Citra

Pindo, Bandung.

Wasistiono, Sadu, 2012, *Manajemen Pemerintahan Daerah*, Alqaprint, Jatinangor.

Wiryatmi, Endang Tri, 2008, *Manajemen Pelayanan Umum*, LAN, Bandung.

Skripsi :

Prima,Eka , 2018, Analisis Implementasi Penerapan Tilang Online Atau E-Tilang Di Kota Pekanbaru, Studi Kasus Di **Polresta Kota Pekanbaru** Fekonsos, Ilmuadministrasi Negara Uin Suska Riau Pekanbaru.

Kusnadi. (2012). Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah (Perda) No 11 Tahun 2001 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Iima Dikawasan Jalan HR.Soebrantas Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, Studi Kasus Di Pasar Malam Jongkok. Skripsi. Fekonsos, Ilmu Administrasi Negara UIN SUSKA RIAU Pekanbaru

Internet :

<https://www.lapor.go.id/instansi/dinas-kependudukan-dan-pencatatan-sipil-kota-pekanbaru/done>

<https://indriani393.wordpress.com/makalah/manajemen-sumberdaya-manusia/>

<http://adhielc.blogspot.com/2012/10/makalah-tentang-manajemen-sumber-daya.html>



<https://www.wikipedia.org/>

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, Tentang *Pemerintahan Daerah*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang *Administrasi*

Kependudukan

Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, Tentang *Pedoman Organisasi*

Perangkat Daerah.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 1999, *Tentang Pedoman*

Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 Tentang *Formulir Dan*

Buku Yang Digunakan Dalam Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan

Sipil

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية

FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO. Box 1004 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: fekonsos@uin-suska.ac.id

Un.04/F.VII/PP.00.9/5674/2018

Pekanbaru, 12 September 2018 M

Biasa

1 Muharram 1440 H

Izin Riset

Kepada

Yth. Kepala Kantor

Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Provinsi Riau

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas
Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Ekin Seprian

NIM. : 11375100919

Jurusan : Administrasi Negara

Semester : XI (Sebelas)

bermaksud mengadakan Riset dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul:
"Analisis Peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dalam
Menanggulangi Angka Pertambahan Penduduk di Kota Pekanbaru" Untuk
itu kami mohon kiranya Saudara berkenan memberikan bantuan yang diperlukan
kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.



Dekan,
Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, MM
NIP. 19620512 198903 1 003

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

UIN Suska Riau atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
UIN Suska Riau atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
UIN Suska Riau atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

UIN Suska Riau atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

UIN Suska Riau atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

UIN Suska Riau atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

UIN Suska Riau atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

UIN Suska Riau atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

UIN Suska Riau atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

UIN Suska Riau atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

UIN Suska Riau atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

UIN Suska Riau atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

UIN Suska Riau atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

UIN Suska Riau atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

UIN Suska Riau atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

UIN Suska Riau atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

UIN Suska Riau atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

UIN Suska Riau atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

UIN Suska Riau atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

UIN Suska Riau atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

UIN Suska Riau atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

UIN Suska Riau atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

UIN Suska Riau atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

UIN Suska Riau atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

UIN Suska Riau atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

UIN Suska Riau atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

UIN Suska Riau atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

UIN Suska Riau atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

UIN Suska Riau atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

UIN Suska Riau atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

UIN Suska Riau atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

UIN Suska Riau atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

UIN Suska Riau atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

UIN Suska Riau atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

UIN Suska Riau atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

UIN Suska Riau atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

UIN Suska Riau atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

UIN Suska Riau atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

UIN Suska Riau atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

UIN Suska Riau atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

UIN Suska Riau atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

UIN Suska Riau atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

UIN Suska Riau atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

UIN Suska Riau atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

UIN Suska Riau atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Mustafa Sari No. 1 Pekanbaru, Kode Pos : 28286 Telp/Faks : (0761) 35463
Website : <http://disdukcapil.pekanbaru.go.id> Email : disdukcapilkotapekanbaru@gmail.com

Pekanbaru, 22 April 2019

Nomor : 071/DISDUKCAPIL/333

Kepada Yth :
Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu
Sosial UIN Suska Riau

-
Keterangan Riset

di -
Pekanbaru

Berkenan dengan surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Riau Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN - RISET/13790 tanggal 19
September 2018 perihal Pelaksanaan Kegiatan Penelitian Riset/Pra Riset dan
Pengumpulan Data untuk Bahan Skripsi, bersama ini kami sampaikan :

Nama : EKIN SEPRIAN
NIM : 11375100919
Jurusan : Administrasi Negara
Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau

Bahwa nama yang tersebut diatas telah melaksanakan Riset/Penelitian
pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru dalam rangka
pengumpulan data/Informasi guna penyelesaian riset yang bersangkutan
dengan judul :

"ANALISIS PERAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIL DALAM MENANGGULANGI ANGKA PERTAMBAHAN PENDUDUK DI
KOTA PEKANBARU" PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Demikian disampaikan untuk di maklumi adanya.

An. KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA PEKANBARU

Sekretaris,
Ub.

Kasubbag Umum dan Kepegawaian



H. ELIZAR, A.Md

Pemata Tkt I, NIP. 19660204 199404 1 001

Hal ini merupakan Uraian yang

Nomor
Lampiran
Perihal

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية

FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO. Box 1004 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: fekonsos@uin-suska.ac.id

: Un.04/F.VII/PP.00.9/3895/2017

: Biasa

Pekanbaru, 31 Mei 2017 M

5 Ramadhan 1438 H

: Bimbingan Skripsi

Kepada

Yth. Ratna Dewi, S.Sos, M.Si

Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,


Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

N a m a	: Ekin Seprian
NIM	: 11375100919
Jurusan	: Administrasi Negara
Semester	: VIII (Delapan)

adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi/ menyusun skripsi dengan judul: "Analisis Peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam Menanggulangi Angka Pertambahan Penduduk di Kota Pekanbaru". Sehubungan dengan itu kami menunjuk Saudara sebagai pembimbing dalam menyelesaikan skripsi mahasiswa tersebut di atas.

Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

Dekan,


Dr. Mahendra Romus, SP, M. Ec
NIP. 19711119 200501 1 004

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- a. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JL. ARIFIN AHMAD NO. 39 TELP. / FAX. (0761) 39399 PEKANBARU



REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 071/BKBP-REKOM/2018/3150

232018

- a. Dasar : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
- b. Menimbang : Rekomendasi dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/13790 tanggal 19 September 2018, perihal pelaksanaan kegiatan Penelitian Riset/Pra Riset dan pengumpulan data untuk bahan Skripsi

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru memberikan Rekomendasi kepada :

1. Nama : **EKIN SEPRIAN**
2. NIM : 11375100919
3. Fakultas : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL UIN SUSKA RIAU
4. Jurusan : ADMINISTRASI NEGARA
5. Jenjang : S1
6. Judul Penelitian : **ANALISIS PERAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DALAM MENANGGULANGI ANGKA PERTAMBAHAN PENDUDUK DI KOTA PEKANBARU**
7. Lokasi Penelitian : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PEKANBARU

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan Riset/Pra Riset/ Penelitian dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan Riset ini berlangsung selama 2 (dua) bulan terhitung mulai tanggal Rekomendasi ini dibuat.
3. Berpakaian sopan, mematuhi etika kantor/lokasi penelitian, bersedia meninggalkan photo copy Kartu Tanda Pengenal.
4. Menyampaikan hasil Riset 1 (satu) rangkap kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru sesuai pasal 23 PERMENDAGRI No. 64 Tahun 2011.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 19 September 2018

a.n. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KOTA PEKANBARU

SEKRETARIS
H. MA'JISCO, S.Sos, M.Si
NIP. 19710514 199403 1 007

Tembusan

Di Sampaikan Kepada Yth :

1. Dekan Fakultas Ekonomi dan Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru
2. Yang Bersangkutan.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sunan Syarif Kasim Riau



PEMERINTAH PROVINSI RIAU

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I & II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jenderal Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39119 Fax. (0761) 39117, PEKANBARU
Email : dpmptsp@riau.go.id

Kode Pos : 28126

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/13790
T E N T A N G



182010

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/5674/2018** Tanggal 12 September 2018, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1. Nama : **EKIN SEPRIAN**
2. NIM / KTP : **11375100919**
3. Program Studi : **ADMINISTRASI NEGARA**
4. Jenjang : **S1**
5. Alamat : **PEKANBARU**
6. Judul Penelitian : **ANALISIS PERAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DALAM MENANGGULANGI ANGKA PERTAMBAHAN PENDUDUK DI KOTA PEKANBARU**
7. Lokasi Penelitian : **DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PEKANBARU**

Dengan Ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan ini.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dibuat.

Demikian Rekomendasi ini diberikan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini dan terima kasih.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 19 September 2018



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI RIAU

Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Walikota Pekanbaru
Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Pekanbaru
3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru
- ④. Yang Bersangkutan

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

PEMERINTAH KOTA PEKANBARU DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Mustafa Sari No. 1 Pekanbaru, Kode Pos : 28286 Telp/Faks : (0761) 35463
Website : <http://disdukcapil.pekanbaru.go.id> Email : disdukcapilkotapekanbaru@gmail.com

Pekanbaru, 22 April 2019

Nomor : 071/DISDUKCAPIL/ 333
Lampiran : -
Perihal : Keterangan Riset

Kepada Yth :
Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu
Sosial UIN Suska Riau

di -
Pekanbaru

Berkenan dengan surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN - RISET/13790 tanggal 19 September 2018 perihal Pelaksanaan Kegiatan Penelitian Riset/Pra Riset dan Pengumpulan Data untuk Bahan Skripsi, bersama ini kami sampaikan :

Nama : EKIN SEPRIAN
NIM : 11375100919
Jurusan : Administrasi Negara
Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau

Bahwa nama yang tersebut diatas telah melaksanakan Riset/ Penelitian pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru dalam rangka pengumpulan data/Informasi guna penyelesaian riset yang bersangkutan dengan judul :

"ANALISIS PERAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DALAM MENANGGULANGI ANGKA PERTAMBAHAN PENDUDUK DI KOTA PEKANBARU"

Demikian disampaikan untuk di maklumi adanya.

An. KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA PEKANBARU

Sekretaris,

Ub.

Kastibag Umum dan Kepegawaian



H. ELIZAR, A.Md

Penata Tk1, NIP. 19660204 199404 1 001